

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.¹

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang senantiasa hadir di tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan sudah mulai hadir dari zaman dahulu kala hingga saat ini, krisis ekonomi yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia terlebih dengan adanya pandemi Covid-19. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai angka 26.420.000 jiwa yang dibandingkan dengan September 2019 jumlah penduduk miskin meningkat hingga 1.630.000 jiwa. Adapun persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen dari poin September

¹ Efendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta : Sagung Seto, 2009) Cetakan pertama, h. 163

2019.² Pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi saat ini oleh bangsa Indonesia sehingga menjadi salah satu faktor kenaikan jumlah penduduk miskin karena banyak masyarakat yang di-PHK (Putus Hubungan Kerja) oleh perusahaan-perusahaan kemudian menjadi pengangguran dan merasa tidak berdaya.

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang ada di dalam wawasan politik pada tingkat nasional kita disebut ketahanan nasional. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.³ Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat dengan mudah untuk bangkit kembali dan berusaha untuk tetap mempertahankan kondisi sosial maupun perekonomian di tengah pandemi ini.

² Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020* (Berita Resmi Statistik), No. 56/Th.XXIII, (15 Juli 2020), h. 2 (diakses pada Sabtu, 12 September 2020 pukul 13.00) <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>

³ Ginandjar Kartasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*. (Disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR tk. I Jawa Timur, Surabaya Maret 1997).

Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan dan ini menjadi tanggung jawab baik pemerintah, swasta, atau organisasi masyarakat sipil. Dari sisi peran pemerintah berbagai program dan kebijakan telah dilaksanakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah sosial tersebut dengan komprehensif. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.⁴

Pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya untuk negara berkembang mutlak diperlukan. Di tengah terpaan badai krisis ekonomi global dan persaingan yang ketat dalam usaha maka transformasi perekonomian suatu negara pasti akan terjadi dan mengarah kepada kemajuan atau ketertinggalan bahkan kehancuran tergantung kepada kekuatan merespon tuntutan tersebut. Pemikiran untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan telah lama dicita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk menggantikan secara fundamental sistem kapitalis yang dilaksanakan kolonialis.⁵

⁴ Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

⁵ Efendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*,... h. ii

Suatu masyarakat dapat berubah tentunya ada dorongan untuk bangkit menghadapi suatu masalah, ada motivasi untuk berubah menjadi lebih baik, perubahan dari masyarakat dibantu dengan suatu bimbingan untuk menemukan sesuatu hal yang baru agar mereka dapat melakukannya sendiri, diarahkan melakukan hal yang dapat membuat masyarakat tersebut menjadi masyarakat berdaya dalam kebutuhan ekonomi, karena melakukan hal yang positif dan diajarkan untuk merubah kehidupan perekonomiannya.⁶

Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan dalam perekonomian sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil adalah dengan berkoperasi. Dalam Undang-undang Dasar 1945 menegaskan di dalam pembukaannya bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan di atas tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menggariskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan

⁶ Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 5

pembangunan. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan nyata.⁷

Dalam pengembangan sumber daya manusia termasuk di dalamnya adalah meningkatkan partisipasi manusia melalui perluasan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, peluang kerja, dan berusaha. Dapatlah dikatakan pengembangan-pengembangan sumber daya manusia mengandung pengertian upaya meningkatkan keterlibatan manusia dalam proses pembangunan. Dengan demikian, manusia seharusnya diletakkan sebagai inti dalam pembangunan. Pembangunan harus bergerak di sekitar manusia, bukan manusia di sekitar pembangunan. Pembangunan harusnya berasal dari manusia, dilakukan oleh manusia, dan untuk kepentingan manusia.⁸

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam ketidakpastian global, perlu melakukan pemberdayaan usaha kecil yang dianggap mampu mengembangkan produksi. Kewirausahaan tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

⁷ Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian (Sejarah, Teori, & Praktek)*, (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2004), cetakan Pertama h. 37

⁸ Tadjudin Noer Eveffendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995), h. 5

Nomor:06/Per/M.K.UKM/VIII/2012 dengan harapan untuk mendorong dan mengakselerasi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta meningkatkan daya saing. Usaha kecil merupakan tumpuan yang diharapkan untuk mengambil strategi dengan menjadikan usaha mandiri, sehat, kuat, berdaya saing serta mengembangkan diri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendukung perluasan kesempatan kerja dalam mewujudkan demokrasi ekonomi.⁹

Hasil survei sosial ekonomi nasional Maret Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin tahun 2019 mencapai 1,68 persen dan masih dikatakan normal jika dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah penduduk miskin mencapai angka 28.210 jiwa dan 29.160 jiwa pada tahun 2019.¹⁰ Dengan pertumbuhan ekonomi yang naik dalam jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan mutlak diperlukan adanya upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendorong perubahan struktural, yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional.

Perubahan ekonomi dari yang lemah kemudian menjadi ekonomi yang tangguh harus ada penunjang dalam perkembangan potensi masyarakat melalui peningkatan peran

⁹ Sukirman, Jiwa Kewirausahaan dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Perilaku Kewirausahaan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Muria Kudus, Vol. 20 No. 1, (April 2017), h. 114

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, Banten.

serta produktifitas dan efisiensi. Peningkatan ekonomi perlu dilakukan secara bertahap, terus-menerus, terpadu dan didasarkan pada kemandirian yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong diri mereka sendiri. Hal ini memberi kesempatan bagi masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Pendekatan yang paling tepat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya Kota Tangerang Selatan yaitu dengan pembangunan sektor usaha kecil dan menengah, melakukan pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat yang mana telah tercatat dalam program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan.

Dalam program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan usaha kecil menengah yang merupakan program pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Tangerang Selatan yang mana program ini menjadi salah satu program perkembangan bagi masyarakat dan para wirausahawan untuk mengembangkan usahanya sehingga bisa menciptakan peluang dan mengedepankan usahanya tidak hanya ranah lingkungan kota tetapi sampai ranah nasional.

Dari berbagai bentuk koperasi berdasarkan lapangan usaha khususnya di Kota Tangerang Selatan penulis tertarik pada Koperasi Serba Usaha (KSU) yang mana koperasi ini adalah

sebuah koperasi yang menjalankan berbagai macam usaha dan terdiri dari anggota-anggota yang memiliki kepentingan yang sama dalam satu lingkungan. Koperasi ini bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Cipta Boga yang tepatnya berada di Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan yang secara umum didirikan sebagai penggerak roda perekonomian yang berbasis kemasyarakatan dan Koperasi ini memposisikan diri sebagai pendamping bagi para pengusaha kecil dalam segi pembangunan jenis usaha. Sebelumnya penulis telah melakukan Pengamatan bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Cipta Boga melakukan pemberdayaan melalui bidang ekonomi yaitu dengan memberikan pelatihan/Training Kewirausahaan untuk usaha kecil menengah bagi masyarakat sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, ada beberapa program yang juga dijalankan oleh KSU Cipta Boga yaitu Pemberdayaan Ekowisata dan Entrepreneur Camp. Pemberdayaan Ekowisata bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam perekonomian masyarakat. Entrepreneur Camp ini bertujuan untuk memberikan wawasan pada anak-anak dan mengasah kemampuan mereka dalam berwirausaha sehingga menjadi penerus dari usaha-usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat sekitar.

Seperti yang dikatakan oleh Staff Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan yaitu Artito

Yugosudarmo dalam wawancara penulis, ia mengatakan bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) yang ada di Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan hadir di tengah masyarakat dan merupakan unit koperasi yang memihak pada ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan guna membantu pemberdayaan masyarakat dan juga perekonomian masyarakat setempat.”¹¹

Berawal dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) kemudian menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) setelah melewati proses panjang pada akhirnya KSU Cipta Boga mendapatkan surat keputusan yang disahkan langsung oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dengan nomor SK. 518/12/BH/Kop.UKM pada tanggal 05 Desember 2012. Dengan adanya Koperasi Serba Usaha (KSU) di mana mayoritas adalah pengusaha jajanan atau makanan ringan khas Tangerang Selatan dinamakanlah Koperasi Serba Usaha (KSU) Cipta Boga.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Cipta Boga ini menarik untuk dikaji dalam penelitian ilmiah dari segi kondisi masyarakat serta program-program dan bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh KSU Cipta Boga dalam perekonomian serta peningkatan produktifitas usaha masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis

¹¹ Artito Yugosudarmo, Staff Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, Wawancara dengan penulis di Kantor Dinas Koperasi & UKM Kota Tangerang Selatan pada Jum'at 18 September 2020 Pukul 10.00 s/d Selesai.

skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Cipta Boga di Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi masyarakat Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan ?
2. Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh KSU Cipta Boga dalam memberdayakan masyarakat di bidang perekonomian dan usaha kecil menengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi masyarakat di Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui program pemberdayaan yang dilakukan KSU Cipta Boga kepada masyarakat yang diberdayakan dalam bidang perekonomian dan usaha kecil menengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

- a) Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam khasanah penelitian sosial pada pengembangan ilmu sosial ekonomi secara umum dan secara khusus untuk jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
- b) Dapat memberikan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis yaitu penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan di setiap kalangan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan koperasi serba usaha.
- b) Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat pemikiran dalam bentuk dokumen yang kaitannya dengan penelitian bagi mahasiswa maupun pembaca untuk mendapatkan data-data yang lebih komperhensif.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan perbandingan dan bahan kajian dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelurusan terhadap karya-karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi yang mana karya tersebut berisi tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di bidang ekonomi melalui Koperasi, yaitu :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Mustangin dkk yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat oleh Koperasi untuk Mewujudkan Kesejahteraan bagi Komunitas Petani di Daerah Cepogo*” di Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Negeri Malang, 2018.¹² Kesimpulan yang didapat dari jurnal tersebut yaitu Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Tekun merupakan lembaga keuangan yang berdiri atas keinginan masyarakat setelah program kerjasama antara LPTP Solo dengan BORDA Jerman. Koperasi Tekun memiliki simpanan harian dan tahunan. Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam tersebut masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses permodalan untuk operasional usaha pertanian dan peternakan. Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Tekun maka masyarakat mengalami perubahan dari segi ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari kesejahteraan anggota suatu kelompok dalam masyarakat, seperti terlihat dari banyaknya investasi masyarakat dalam bentuk hewan ternak yang merupakan hasil pinjaman maupun tabungan kelompok. Banyak dampak lain yang terlihat dari segi ekonomi adalah adanya pedagang yang mengembangkan usaha baru yang berada di luar boyolali. Kontribusi lainnya membantu terjaganya tradisi masyarakat, dengan mengurangi beban pembiayaan untuk melaksanakan tradisi bersih desa.

¹² Mustangin dkk, “Pemberdayaan Masyarakat oleh Koperasi untuk Mewujudkan Kesejahteraan bagi Komunitas Petani di Daerah Cepogo”, *International Journal of Community Service Learning*, Vol. 2 no. 2, (2018) di Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Negeri Malang.

Penelitian tersebut di atas mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui koperasi simpan pinjam yang memperlihatkan bahwa pemberdayaan tersebut diberikan hanya berfokus pada usaha pertanian dan peternakan dengan memberikan permodalan operasional dan simpan pinjam untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan pada penelitian yang dikaji oleh peneliti dalam meneliti pemberdayaan masyarakat yaitu melalui KSU Cipta Boga yang terdapat pada aspek ekonomi dan pengembangan usaha. Selain itu masyarakat mendapatkan pelatihan, binaan, pendampingan sehingga unsur pemberdayaan tersebut berjalan hingga saat ini dan banyak pula masyarakat yang tergabung dalam koperasi serba usaha tersebut.

Kedua, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial yang ditulis oleh Ety Rahayu yang berjudul “*Pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan pengurus koperasi jasa keuangan*” di Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.¹³ Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEMK) merupakan program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memberdayakan usaha mikro yang ada di kelurahan melalui bantuan permodalan. Dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), Unit Pengelola Dana Bergulir

¹³ Ety Rahayu, ”Pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan pengurus koperasi jasa keuangan”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 19 No. 1 (2018), di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

(UPDB) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta bermitra dengan Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK). KJK PEMK Kelapa Gading Barat merupakan KJK PEMK yang lancar dalam pengembalian angsuran dana bergulir kepada UPDB. Temuan lapangan yang ditulis menunjukkan bahwa memang ada upaya pemberdayaan dari UPDB kepada para pengurus/pengelola KJK PEMK agar mereka memiliki kemampuan dalam mengelola KJK PEMK, yaitu dalam bentuk *capacity building*, berupa pelatihan, studi banding dan outbond.

Penelitian tersebut di atas mengkaji pemberdayaan kepada pengurus koperasi yang merupakan salah satu program dari pemerintah untuk bisa mengembangkan dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka adanya pemberdayaan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti dalam meneliti pemberdayaan masyarakat dan koperasi serba usaha yang mencoba memberdayakan masyarakat (bukan pengurus koperasi) sekitar dari segi ekonomi yaitu dengan melakukan kegiatan pemberdayaan pelatihan, pembinaan, training, dan lain sebagainya dari usaha koperasi itu sendiri/tidak dari program pemerintah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Irhineu Dwi Wahyu Pratiwi yang berjudul “*Pengaruh Program Pemberdayaan Melalui Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan*

Penghasilan Anggota Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat”, 2014.¹⁴ Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut yaitu bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peminjaman modal Koperasi Simpan Pinjam dalam memberdayakan UMKM memiliki pengaruh terhadap peningkatan penghasilan masyarakat, yang mengikuti program simpan pinjam tersebut hanyalah 9 orang dikarenakan koperasi tersebut belum terlaksana dengan baik, meskipun begitu dari 9 orang tersebut terdapat 7 orang yang berhasil mengalami peningkatan penghasilan dan yang belum berhasil ada 2 orang.

Penelitian tersebut di atas mengkaji tentang pengaruh pemberdayaan melalui koperasi simpan pinjam terhadap peningkatan penghasilan anggota UMKM dengan melakukan peminjaman modal kepada anggota UMKM tersebut tanpa adanya pelatihan dan juga pembinaan terhadap anggota UMKM yang diberikan pinjaman modal usaha. Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan pada penelitian yang dikaji oleh peneliti dalam meneliti pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh KSU Cipta Boga yaitu melalui pemberdayaan ekonomi dengan melakukan pelatihan, pembinaan, training kewirausahaan, dari kegiatan tersebut tidak luput dari pinjaman modal usaha terhadap

¹⁴ Irhineu Dwi Wahyu Pratiwi, “Pengaruh Program Pemberdayaan Melalui Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Penghasilan Anggota Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat” (Skripsi Sarjana UIN “Syarif Hidayatullah”, Jakarta 2014)

anggota masyarakat yang ikut terlibat dalam KSU Cipta Boga sehingga dapat membantu masyarakat dalam bidang ekonomi.

F. Kajian Teoretis

1) Pemberdayaan Masyarakat

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Islam

Dewasa ini banyak nuansa pemahaman terhadap konsep pemberdayaan dalam pembangunan. Konsep pemberdayaan merupakan upaya mencari bentuk konsep pembangunan yang ideal setelah berbagai paradigma pembangunan sebelumnya gagal memenuhi harapan sebagian besar umat manusia. Friedman mengatakan bahwa konsep pemberdayaan merupakan paradigma terakhir dari konsep pembangunan manusia yang kemunculannya disebabkan oleh karena adanya dua permasalahan, yakni: kegagalan dan harapan, yaitu gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dengan harapan-harapan adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.¹⁵

Pandangan lain konsep pemberdayaan dikemukakan oleh *Narayan* menjelaskan “*Empowerment*

¹⁵ M. Syafar Supadjan, “Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pembiayaan Mikro (Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Koperasi Baytul Ikhtiar Kabupaten Bogor – Jawa Barat)”, *Tesis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, (2012), h. 42.

is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives”.

Pemberdayaan dimaknai sebagai sebuah intervensi yang merupakan suatu upaya untuk memperkuat sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan sendiri masa depannya. Definisi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk melakukan proses perubahan agar masyarakat memahami manfaat dan peranannya dalam program pembangunan, mampu merumuskan kebutuhan dengan potensi/sumberdaya yang dimiliki, mampu menentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan kebutuhan dan potensinya, serta mampu menyusun rencana kegiatan untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya.¹⁶

Gagasan pemberdayaan (*empowerment*) adalah sentral bagi sesuatu strategi keadilan sosial dan HAM, walaupun pemberdayaan adalah kata yang telah digunakan secara berlebihan dan sedang berada dalam bahaya kehilangan arti substantifnya. Ia merupakan pusat dari gagasan-gagasan kerja masyarakat, dan

¹⁶ M. Syafar Supardjan, “Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pembiayaan Mikro (Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Koperasi Baytul Ikhtiar Kabupaten Bogor – Jawa Barat)”,..... h. 42

banyak pekerja masyarakat akan memilih mendefinisikan peranan mereka dalam pengertian suatu proses pemberdayaan. Meskipun demikian, suatu definisi kerja yang sederhana akan mencakupi, yaitu: Pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka dirugikan (*the disadvantaged*).¹⁷

Al-Qur'an yang merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW., untuk menjadi sumber hukum dan juga sumber inspirasi bagi umat Islam. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang mengajak manusia untuk bersama-sama berkontribusi memberdayakan masyarakatnya guna mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif karena dalam program pemberdayaan masyarakat didorong untuk mengubah diri mereka sendiri dan dilatih untuk mandiri. Islam sangat mendorong dan menganjurkan pemeluknya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan semangat islam dan umatnya untuk menjadi agama yang rahmatan lil 'alamin.¹⁸

¹⁷ Jim Iff, Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) edisi Ketiga, h. 173

¹⁸ Ulfy Putra Sany, "Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39, No. 1 (2019), h. 33

Salah satu upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak adalah dengan jalan pemberdayaan masyarakat. hal tersebut juga disebutkan oleh Widayanti mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi *concern* publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial, terutama kemiskinan, yang dilaksanakan berbagai elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Sipil. Aksi pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Aksi pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan untuk memandirikan masyarakat agar dapat menghadapi berbagai tantangan di kehidupannya.¹⁹

Adapun masyarakat diartikan dalam dua konsep, yaitu:

1. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
2. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada

¹⁹ Mustangin dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal melalui Program Desa Wisata di Bumiaji, Sosioglobal: *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No.1, (Desember 2017), h. 60

masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna layanan kesehatan mental.

Dalam Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama.²⁰

b. Fungsi dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suryoto Usman fungsi dan tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan.

Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencakupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada

²⁰ Ulfy Putra Sany, "Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an",h. 34

tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian yang masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural.²¹

c. Dasar dan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Delivery dalam Sutrisno dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan. Selanjutnya, Dahama dan Bhatnagar dalam Mardikanto mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang lain yang mencakup: Minat dan kebutuhan, organisasi masyarakat bawah, keragaman budaya, perubahan budaya, kerjasama dan partisipasi, demokrasi dan penerapan ilmu, belajar sambil bekerja,

²¹ Cholisin, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Disampaikan pada Gladi Manajemen Pemerintah Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian, Sleman: 2011), h. 2

penggunaan metode yang sesuai, kepemimpinan, spesialis yang terlatih, dan segenap keluarga.²²

Dalam pelaksanaannya, Islam mendorong pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 (tiga) prinsip utama, yakni:

Pertama, prinsip *ukhuwwah*. *Ukhuwwah* dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Hujurat (49) ayat 10. Dalam konteks pemberdayaan, *ukhuwwah* merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah SAW., memiliki visi masyarakat muslim yang saling tolong menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW., “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat”.

²² Ahmad Sururi, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 2 (Jan-April, 2015), h. 5-6

Islam juga merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya.

Kedua, prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Sebagaimana tertera dalam firman Allah QS. Al-Maidah (5) ayat 2.

Ketiga, prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Islam telah memproklamkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu yang disebutkan dalam QS. Al-Hujurat (49) ayat 13. Ayat tersebut menegaskan persamaan derajat antar manusia, dan bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Ayat tersebut juga menekankan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi *wasilah* untuk tolong-menolong dan saling membantu.²³

d. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum mampu menjawab

²³ Ulfy Putra Sany, "Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an",... h. 35-36

tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga belum mengangkat sebagian penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat. Berangkat dari kondisi tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah :

1. Kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya di dalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”
2. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa

“hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat”.

3. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kerberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, politik.²⁴

2) Pemberdayaan Ekonomi

Ekonomi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yang berarti aikos yaitu rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos yaitu ilmu. Jadi, ilmu yang mengurus segala urusan keluarga dan rumah tangga baik dalam konsumsi, distribusi dan produksi barang dan jasa.²⁵

²⁴ Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal CIVIS*, Vol. 1, No. 2, (Juli-2011), h. 89-90

²⁵ Ritanggo dkk, *Pelajaran Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 10

Secara umum, ekonomi dapat dikatakan sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumberdaya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumberdaya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.²⁶

Konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal.²⁷ Dari berbagai tulisan Sumodiningrat, menyatakan konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

²⁶ Arik Budiarto, *Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 76

²⁷ Efendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat,...* h. 6

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke mandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:
(1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya;
(2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi;
(4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin

adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.²⁸

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 5 tujuan pemberdayaan yaitu: (a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, (b) menumbuhkandan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan (c) meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan

²⁸ Efendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat,...* h. 9

kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Adapun strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu: (1) motivasi, (2) peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, (3) manajemen diri, (4) mobilisasi sumberdaya, (5) pembangunan dan pengembangan jejaring.²⁹ M Umar Chapra mengakui bahwa untuk merubah paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat bukan hal mudah. Hal tersebut membutuhkan sejumlah perubahan revolusioner dalam lingkungan social ekonomi.³⁰

3) Koperasi

1. Konsep Koperasi

Terdapat bermacam-macam definisi koperasi dan jika diteliti secara seksama, maka tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Definisi awal umumnya menekankan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah, seperti definisi yang diberikan Dr. Fay menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak

²⁹ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 170

³⁰ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 107

memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.³¹

Menurut Ann Hoyt dalam pernyataan *International Cooperative Alliance* (ICA) tentang *Cooperative Identity*, yang menyatakan bahwa Koperasi adalah assosiasi yang bersifat otonom dengan keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, sosial dan kultur melalui usaha bersama saling membantu dan mengontrol usahanya secara demokratik. Pada UU No. 25 tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi otonom dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-norma/kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia.³²

³¹ Muhammad Firdaus, Agus Edi Susanto, *Perkoperasian (Sejarah, Teori, & Praktek)*,... h. 38

³² Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: LPFEUI, 2005), edisi kedua, h. 18

2. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi

Menurut pasal 4 UURI No. 25/1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Gambaran dari fungsi dan peran koperasi Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran.
2. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.

3. Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha.
4. Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.
5. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.
6. Koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.³³

Di Jerman, Herman Schulze-Delitzsch adalah orang pertama yang berhasil mengembangkan sebuah organisasi koperasi bagi perintisan dan pengembangan secara bertahap pada organisasi koperasi kredit perkotaan. Demikian pula koperasi-koperasi pengadaan sarana produksi di kalangan para pengrajin, yang kemudian diterapkan di kalangan para pedagang kecil dan kelompok mata pencarian yang lain. Ia menekankan agar prinsip menolong diri sendiri (*self help*), prinsip pengurus/mengelola sendiri (*self inatiagetnent*) dan mengawasi sendiri (*self control*) yang dilakukan oleh para anggota merupakan sendi-sendi dasar organisasi-organisasi koperasi. Dari sendi-sendi dasar ini kemudian dikembangkan prinsip identitas pada koperasi (*identity principles*) yang memberikan ciri khusus organisasi

³³ Muhammad Firdaus, Agus Edi Susanto, *Perkoperasian (Sejarah, Teori, & Praktek)*,... h. 43-45

koperasi (*identity criterion*) yang membedakan koperasi dari organisasi lainnya.

Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992, prinsip koperasi dinyatakan sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela,
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis,
- c. pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
- e. kemandirian,
- f. pendidikan perkoperasian,
- g. kerjasama antar koperasi.³⁴

3. Bentuk-bentuk Koperasi

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 15 UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi ini dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan

³⁴ Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*,..., h. 3

beranggotakan koperasi primer dan/atau koperasi sekunder. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, gabungan dan induk maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.

Jika dilihat kembali ketentuan pasal 15 dan 16 UU No. 12 Tahun 1967 beserta penjelasannya, maka dapat diketahui empat tingkatan organisasi koperasi yang didasarkan atau disesuaikan dengan tingkat daerah administrasi pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

- a. Koperasi primer, dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
- b. Pusat koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) koperasi primer yang berbadan hukum. Koperasi ini daerah kerjanya adalah daerah tingkat II (tingkat kabupaten)
- c. Gabungan koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) pusat koperasi primer yang berbadan hukum.

Gabungan koperasi ono daerah kerjanya adalah tingkat I (tingkat provinsi)

- d. Induk koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum. Induk koperasi ini daerah kerjanya adalah Ibukota Negara RI (tingkat nasional).³⁵

4. Jenis-jenis Koperasi

Koperasi berdasarkan bidang usaha dan kebutuhan dalam ekonomi, dapat digolongkan sebagai berikut.

- a. *Koperasi Konsumsi* adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.
- b. *Koperasi Produksi* adalah kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.

³⁵ Muhammad Firdaus, Agus Edi Susanto, *Perkoperasian (Sejarah, Teori, & Praktek)*,... h. 61

- c. *Koperasi Pemasaran* adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
- d. *Koperasi Kredit/Simpan Pinjam* adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan untuk mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.³⁶

Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain sebagai berikut.

- a. Koperasi Desa/Koperasi Serba Usaha

Yang dimaksud dengan koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya sendiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. Koperasi desa

³⁶ Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. Keempat, h. 35

menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan. Jadi, koperasi ini dapat menjalankan beberapa macam usaha (*multipurpose*) sesuai dengan keperluan masyarakat dan lingkungan.

b. Koperasi Pertanian

Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani, pemilik tanah, penggarap, buruh tani dan orang-orang yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan.

c. Koperasi Peternakan

Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh ternak yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan peternakan.

d. Koperasi Perikanan

Koperasi perikanan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan.

e. Koperasi Kerajinan/Industri

Koperasi kerajinan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat-alat produksi dan buruh yang berkepentingan serta mata pencaharian langsung berhubungan dengan kerajinan/industri yang bersangkutan.

f. Koperasi Asuransi

Usaha untuk menumbuhkan asuransi secara koperatif telah diberikan gagasan dan dianjurkan oleh Menteri Nakertranskop tahun 1975. Tujuan asuransi untuk memperkecil resiko serta melalui usaha koperasi dapat mengumpulkan dana yang cukup besar. Asuransi koperasi Indonesia dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan anggota. Salah satu contoh koperasi asuransi adalah Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) yang pada akhir tahun 1995 telah mempunyai 2.567.798 pemegang polis, menduduki peringkat empat dalam deretan asuransi-asuransi jiwa di Indonesia dalam hal jumlah penjualan polis.

g. Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa didahului dengan berdirinya BUUD/KUD yang mendasarkan pada Inpres No. 4 Tahun 1973. Sesungguhnya, mendahului berdirinya BUUD/ KUD, Kepala Daerah Istimewa

Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 1971 telah mengeluarkan SK No. 32/1971 bagi pendirian suatu BUUD percobaan, cita-cita mana didukung oleh BRI dan peneliti dari UGM.³⁷

4) Usaha Kecil Menengah

Menurut UU No. 8 tahun 2008 usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Karakteristik usaha mikro menurut Ilo adalah usaha mikro di negara berkembang mempunyai karakteristik, antara lain usaha dengan maksimal 10 orang pekerja, berskala kecil, menggunakan teknologi sederhana, aset minim, kemampuan manajerial rendah, dan tidak membayar pajak. Adapun karakteristik usaha mikro menurut Farbman dan Lessik menjelaskan bahwa karakteristik usaha ekonomi mikro antara lain mempekerjakan paling banyak 10 orang pekerja, merupakan usaha keluarga dan menggunakan tenaga kerja keluarga, lokasi kerja biasanya di rumah, menggunakan teknologi tradisional, dan berorientasi pasar lokal.³⁸

³⁷ Muhammad Firdaus, Agus Edi Susanto, *Perkoperasian (Sejarah, Teori, & Praktek)*,...h. 65-69

³⁸ Dina Nurdiana, "Dampak Signifikansi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) pada Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro Perempuan di Kecamatan Kota Semene", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 2, (2016), h. 296-297

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi, metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.³⁹

Dalam suatu penelitian metode mempunyai peran penting dalam pengumpulan dan analisis data. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural Setting*).⁴⁰ Metode penelitian ini lebih cenderung menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*) dan sumber data penelitian kualitatif adalah bentuk tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis (*deskriptif*) yang dicermati oleh penulis, dan benda-benda yang diamati sampai detail.⁴¹

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan atau menganalisis tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KSU Cipta Boga yang berlokasi

³⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010) h. 16

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), cetakan ke-23, h. 8

⁴¹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cetakan pertama, h. 28.

di Kelurahan Kranggan Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴² Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a) Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses.⁴³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non partisipan yaitu penulis tidak terlibat dalam segala kegiatan dan hanya sebagai pengamat independen dan melakukan pencatatan terhadap objek penelitian yaitu di Koperasi Serba Usaha (KSU) Cipta Boga yang berada di Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Banten

224. ⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,... h.

⁴³ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,... h. 77.

b) Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.⁴⁴ Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semiterstruktur (*in-depth interview*). Wawancara semistruktur merupakan wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁴⁵

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Pendiri KSU Cipta Boga, 1 orang Staff Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, 1 orang aparat kelurahan, dan 10 orang masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan KSU Cipta Boga. Penulis telah melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan secara bergiliran kepada setiap informan. Penulis melakukan wawancara tersebut dengan merekam dan mencatat isi pembicaraan yang

231. ⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,... h.

233. ⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,... h.

berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari wawancara yang telah dicatat kemudian dianalisis.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, gambar dan sebagainya.⁴⁶

Dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh penulis ialah berupa arsip, struktur pengurus KSU Cipta Boga dan foto-foto kegiatan pemberdayaan di KSU Cipta Boga dan data monografi Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Banten.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Menurut Suharsimi Arikunto, data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya melalui wawancara, observasi, dan lain-lain.⁴⁷ Dalam penelitian ini, penulis mengambil data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara terhadap pihak yang terlibat yang telah ditentukan.

⁴⁶ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,... h. 78

⁴⁷ Vina Herviani, Angky Febriansyah, "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*, (Oktober 2016) Vol. 7, No. 2, h. 12

b) Data sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen seperti struktur kepengurusan, profil lembaga, buku-buku yang terkait, internet, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁴⁹ Berikut adalah langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.⁵⁰ Reduksi data

⁴⁸ Vina Herviani, Angky Febriansyah, Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung..., h. 12.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,... h. 246.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,... h. 249.

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna.⁵¹

Dalam penelitian ini, penulis mereduksi data-data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian yaitu KSU Cipta Boga Kelurahan Kranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, yang berupa kegiatan pemberdayaan ekonomi dari program KSU Cipta Boga terhadap masyarakat dan anggotanya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang kemungkinan untuk menarik kesimpulan.⁵² Dalam penyajian data, penulis menyajikan dalam bentuk uraian-uraian. Uraian data tersebut berupa penjelasan mengenai program pemberdayaan di KSU Cipta Boga dalam memberdayakan masyarakat Kelurahan

⁵¹ Nunung Ismawati, "Pemanfaatan Media Internet Sebagai Sumber Belajar Pada Mahasiswa Komunikasi Islam Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara", *Tesis Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara*, (2012), h. 72.

⁵² Nunung Ismawati, "Pemanfaatan Media Internet Sebagai Sumber Belajar Pada Mahasiswa Komunikasi Islam Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara",... h. 73.

Kranggan dari perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, serta keberhasilan dari pemberdayaan tersebut.

c. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.⁵³ Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁵⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang Profil Lembaga yang terkait. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab yakni gambaran umum dan

⁵³ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,... h. 124.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,... h. 252-253

profil lokasi penelitian yaitu Kelurahan Keranggan, Profil lembaga yaitu KSU Cipta Boga yang di dalamnya terdapat beberapa bagian yakni latar belakang berdirinya KSU Cipta Boga, visi misi serta tujuan KSU Cipta Boga, program-program KSU Cipta Boga, sumber pendanaan dan Permodalan KSU Cipta Boga, jumlah anggota masyarakat yang diberdayakan dalam KSU Cipta Boga serta Fasilitas pemberdayaan KSU Cipta Boga.

BAB III menjelaskan tentang keadaan masyarakat di Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan yang dianalisis dan diuraikan sebagai hasil dari penelitian. Bab ini dibagi dengan beberapa sub-bab yakni gambaran keadaan umum lokasi penelitian yaitu kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Kranggan, dan kondisi sosial masyarakat Kelurahan Keranggan kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.

BAB IV menjelaskan hasil lapangan dan analisis pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan melalui Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Koperasi Serba Usaha (KSU) Cipta Boga yang berlokasi di Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang selatan yang akan dianalisis dan diuraikan sebagai hasil penelitian. Bab ini dibagi dalam beberapa sub-bab yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh KSU Cipta Boga, bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi KSU Cipta Boga, tahapan pemberdayaan KSU Cipta Boga, manfaat pemberdayaan KSU Cipta boga, faktor pendukung dan

penghambat dari pemberdayaan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat KSU Cipta Boga Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari rumusan masalah, dan saran-saran.

